

B. 32

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN
**HUKUM EKONOMI
INDONESIA**
(KUMPULAN KARANGAN)



EDITOR :
NURUL ELMIYAH - ROSA AGUSTINA

Prof. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M., Ph.D

Lahir di Padang, 1 Juni 1946. Semenjak mahasiswa telah aktif berorganisasi antara lain pernah menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia periode 1973 - 1975, Staf pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, periode 1968 - 1974 dan wartawan "Harian Kami sampai surat kabar tersebut di bredel tahun 1974. Kecintaan pada jurnalistik dilanjutkan menjadi Redaktur majalah "Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UI" periode 1975.

Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1975. Karier konsultan hukum dimulai dengan membuka kantor konsultan hukum "Erman & Associates" pada tahun 1975, kemudian menjadi Konsultan Hukum pada "Adnan Buyung Nasution & Associates" pada periode 1980 - 1982.

Strata S2 dan S3 diperoleh dari School of Law University of Washington, Seattle, periode 1982 - 1988 dan mendapat LL.M tahun 1984 serta Ph.D pada tahun 1988. Sekembalinya di tanah air melanjutkan sebagai Konsultan Hukum dan memberi kuliah di berbagai Universitas. Di almamater beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik periode 1990 - 1994, dan pada tahun 1997 diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UI. Periode tahun 2000 - 2004 pernah menjadi Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI tahun 2000 - 2004.

Karier sebagai Direktur Jenderal Hukum & Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1998, delapan bulan kemudian diangkat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet RI sampai dengan April 2005.

Kesetiaan pada dunia akademis dan pengabdianya kepada masyarakat menghantar Prof. Erman Rajagukguk memperoleh penghargaan "Honorary Initiation" dari University of Washington Chapter of The Order of the Coif pada November 28, 2001 dan juga "Lifetime Achievement Award" pada Juni 12, 2013. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2005, tgl. 18 Oktober 2005 ditetapkan sebagai Penasehat Delegasi Indonesia untuk Perundingan WTO.

Sejak menjadi Guru Besar pada tahun 1997 hingga sekarang telah menjadi Promotor Program Doktor sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, dan sebagai Ko Promotor sebanyak 7 (tujuh) orang. Sebelas orang diantaranya mengikuti jejak beliau sebagai Guru Besar. Bimbingan Prof. Erman telah menyebar di berbagai tempat dalam jabatan-jabatan penting.



ISBN 78-797-8972-67-6

ERMAN RAJAGUKGUK 70 TAHUN
HUKUM EKONOMI INDONESIA
(KUMPULAN KARANGAN)

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit FHUI

Kampus FHUI
Gedung A Depok 16424
Telp. (021) 7270003 eks. 10/18/40
Faks (021)7270052
E-mail humas@law.ui.ac.id

Cetakan Pertama, Mei 2016
Editor: Nurul Elmiyah
Rosa Agustina

Penata Letak:
Dedi Kuspendi

Sumber Cover:
www.rajamobil.com

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam terbitan (KDT)
Erman Radjaguguk 70 tahun hukum ekonomi Indonesia:
kumpulan karangan / Nurul Elmiyah, Rosa Agustina
xxvi+800 hlm; 18,5 x 23 cm
ISBN : 78-979-8972-67-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Isi diluar tanggung jawab penerbit
Semua yang tercantum dalam buku ini dapat dikutip
dengan mencantumkan sumbernya

DAFTAR ISI

1. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ..	v
2. PENGANTAR	vii
3. DAFTAR ISI	ix
4. MEA DAN TANTANGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Hikmahanto Juwana	1
5. POLICY EVALUATION PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL (PERSIAPAN MENJELANG MEA 2015) Darminto Hartono.....	21
6. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS (IIAS)/BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) Yetty Komalasari Dewi.....	59
7. STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Mukti Fajar ND	85
8. LAWS AND REGULATIONS: THE ROLE OF PIONEER AIR TRANSPORT TO STIMULATE THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT Ahmad Sudiro	107
9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR RITEL MODERN: STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN USAHA MIKRO-KECIL-MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Anna Maria Tri Anggraini.....	129
10. KRISIS EKONOMI DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DEBITOR DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Siti Anisah	155
11. INTERVENSI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN Akhmad Budi Cahyono.....	173
12. PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN MENGONSUMSI OBAT DAN MAKANAN Inosentius Samsul	187

13. PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP PENERAPAN LEMBAGA RISK RETENTION GROUPS (RRG) DAN PURCHASING GROUP (PG) PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA Hamzah.....	207
14. STRATEGI ANTI-FRAUD UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING Bismar Nasution	235
15. KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI. Yenti Garnasih	247
16. FUNDAMEN HUKUM PERBURUHAN TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN DALAM ERA GLOBALISASI DI INDONESIA Abdullah Sulaiman.....	267
17. PENDEKATAN TAZKIYATUN NAFS DALAM HUKUM EKONOMI Fokky Fuad.....	313
18. ASPEK HUKUM PEMBATAAN LUAS LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN Ermanto Fahamsyah	331
19. ASEAN MODEL UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA: BELAJAR DARI PENGALAMAN INDONESIA Agus Sardjono	347



LAWS AND REGULATIONS: THE ROLE OF PIONEER AIR TRANSPORT TO STIMULATE THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Ahmad Sudiro^[1]

I. Introduction

Indonesia's aviation industry has recorded a much faster growth than land and sea transport industry. In the first 10 months of 2012, the number of air transport passengers totaled 40,485,295 passengers including 35,522,576 domestic passengers and 5,322,719 passengers international flight. In 2011, the number of passengers totaled 68,349,439 passengers including 60,197,306 domestic passengers and 8,152,133 passengers international flight. Those of total passengers included passengers of subsidized pioneer flight to and from isolated areas (emphasize added). In 2012, the government provided IDR 279.2 billion in subsidy for 130 routes in 19 provinces.^[2]

The high demand for air transport service in a number of small cities has encouraged airlines to provide extra flights. Demand for extra flight service on the route is high during holidays every year. The market of domestic air transport service is dominated by Lion Air as the pioneer in budget airline putting behind Garuda Indonesia, which has much longer flight hours in the country. In addition to the number of passenger, the destination of airline also increases by 27 routes. In 2012, the number of domestic commercial routes grew to 249 routes from 222 in 2011.^[3] The Ministry of Communications (MoC) plans to open 130 new flight routes starting in 2012 offering them to local private airlines. Most of the routes are in eastern part of the country such ones based in Manado, Ambon and Papua. The opening of new routes is to provide links to isolated areas and to facilitate tourist flights to the tourist objects in those areas. The routes are selected by the government, but some are on request from the airlines.^[4]

The purpose of this article is to described the Civil Aviation of 2009 (the CAA of 2009) including cabotage, domestic scheduled air transportation such as class of services, business permit; tariff regulation of air transportation; non-scheduled air transportation; general aviation; pioneer air transportation include the determination of pioneer routes such typical of pioneer routes, classification of pioneer routes; tariff regulation of pioneer air transportation; subsidy of pioneer air transportation; implementation of pioneer air transportation; compensation; requirement of

¹ Senior Lecturer & Dean Faculty of Law - Tarumanagara University, and Chairman of Association of Indonesian Legal Profession. He actively research and writes books and articles in various scientific journal on various matters relating to airspace law.

² *Low Cost Carriers New Growth Driver in Indonesia's Air Transport Service*. Indonesia Commercial New Letter, August 2012.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*